

**LAPORAN TESIS**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN  
TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI  
DI KABUPATEN POSO**



**RALPH CAHYO KURNIAWAN TOMINA  
21.C2.0017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2024**

**LAPORAN TESIS**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN  
TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI  
DI KABUPATEN POSO**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi  
Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum**



**RALPH CAHYO KURNIAWAN TOMINA  
21.C2.0017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2024**

## ABSTRAK

Keberadaan tukang gigi di Indonesia semakin hari semakin bertambah pesat dan terdapat di berbagai tempat yang cukup mudah untuk dijumpai karena hampir di seluruh Indonesia, dimana pada mulanya hanya menerima dan membuat gigi palsu atau tiruan hingga kini telah bertambah dengan penambalan gigi, pencabutan gigi, pemasangan mahkota gigi hingga pemasangan alat ortodonti tanpa memperhatikan kaidah dalam medis sebab tukang gigi tidak pernah mempelajari ilmu kedokteran gigi, sehingga tukang gigi ini dapat dikatakan ilegal karena tidak memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa pengaturan hukum pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Indonesia dan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pelaksanaan pengawasan pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di wilayahnya serta kendala-kendala yang ditemui Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pengawasan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi dan solusi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Kabupaten Poso belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun dasar hukum atau pengaturan hukum pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Indonesia sudah sangat jelas diatur melalui Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, Kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pelaksanaan pengawasan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di wilayahnya belum maksimal karena belum memiliki data riil tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi dan belum turun langsung melakukan pengawasan terhadap tukang gigi. Pengawasan belum dilaksanakan karena benturan pada anggaran yang belum ada dan kendala yang ditemui Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tukang gigi dan solusi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasinya adalah memprogramkan dan menganggarkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban serta pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan sesuai dengan yang telah diatur melalui Permenkes Nomor 39 Tahun 2014.

Kata Kunci: Pengawasan, Pelayanan Kesehatan, Tukang Gigi

## ABSTRACT

The existence of denturist in Indonesia is increasing rapidly in various places that are quite easy to find because almost over Indonesia, where at first only received and made dentures or dentures until increased with tooth fillings, tooth extractions, installation of dental crowns to the installation of orthodontic devices without paying attention to medical rules because they have never studied dentistry, so that the denturist can be said to be illegal because does not have official permission from the relevant Health Office.

The aims: to explain and analyse the legal regulation of health services carried out by denturists in Indonesia and the authority of Poso District Health Office on the implementation of health service supervision carried out by denturists in their area as well as the obstacles encountered by Poso Regency Health Office on health service supervision carried out by dentists and solutions that can be provided to local governments to overcome them.

This research uses empirical, qualitative descriptive juridical research with a socio-legal approach. The data obtained from interviews with sources.

The results showed that the implementation of supervision of health services carried out by denturists in Poso Regency has not run as it should even though the legal basis or legal regulation of health services carried out by dentists in Indonesia is very clearly regulated through Permenkes Number 39 of 2014, the authority of Poso Regency Health Office on health service supervision carried out by denturists in its area has not been maximized because they do not have real data and have not come down directly to supervise denturists. Supervision has not been implemented due to the clash in the budget does not yet exist and the constraints encountered by Poso District Health Office and solutions that can be provided to government to overcome them are: program and budget supervision and guidance on health services carried out by denturists so they can know the rights and obligations and services that can be carried out in accordance with what has been regulated through Permenkes Number 39 of 2014.

Keywords: Surveillance, Healthcare, Denturist